

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peran perekonomian Indonesia dalam hal ini sub sektor pertanian termasuk dalam ranah yang sangat penting bagi Negara Indonesia, dengan nilai PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 13,26 % tahun 2018 terbesar kedua setelah sub sektor industri dengan nilai PDB sebesar 20,27 %. Sub sektor pertanian ini menjadi salah satu andalan Indonesia dalam menghadapi perekonomian global. Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraria memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah, sehingga sangat potensial untuk pengembangan usaha di bidang agribisnis pada era globalisasi yang tentunya diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian Indonesia (BPS, Sub Sektor Penyumbang PDB Terbesar Indonesia, 2018).

Tabel 1. Sub Sektor Penyumbang PDB Terbesar Indonesia Tahun 2018

<b>Sub Sektor</b> <i>Sub Sector</i>	<b>PDB</b> <i>Gross Domestic Product</i>
Industri	20,27 %
Pertanian	13,26 %
Perdagangan	13,12 %
Konstruksi	10,49 %

*Sumber : (BPS, Sub Sektor Penyumbang PDB Terbesar Indonesia, 2018)*

Salah satu bagian dari sub sektor pertanian ini adalah sektor perkebunan dalam hal ini komoditas karet. Karet dalam bahasa ilmiahnya *Hevea brasiliensis* termasuk ke dalam jenis genus *Hevea* dari familia *Euphorbiaceae* yang merupakan pohon kayu hutan tropis yang berasal dari hutan Amazon Brazil. Di dunia, setidaknya ada sebanyak 2.500 spesies tanaman yang diakui dapat memproduksi lateks (Getah), tetapi *Hevea brasiliensis* yang saat ini merupakan

satu satunya sumber komersial produksi karet alam. Karet alam sampai saat ini mewakili hampir separuh dari total produksi karet dunia karena sifat unik mekanik, seperti ketahanan sobek dari hasilnya yang dapat kita bandingkan dengan karet sintetis. Karet alam diproduksi terutama di Asia Tenggara sebesar 93% dari seluruh wilayah, dimana Indonesia merupakan Negara produsen kedua terbesar di dunia setelah Thailand.

Karet alam diperoleh dari lateks yang diproduksi *sel latisifer* yang berada di kulit batang tanaman karet. Tanaman karet dalam praktek pengolahannya diperoleh dengan cara melakukan penyadapan pada panel batang karet yang kemudian lateks tersebut dikumpulkan dan diolah (Putranto, 2013).

Banyaknya tanaman karet di Indonesia ini ditandai dengan tersebarnya tanaman karet di seluruh wilayah terutama di pulau Sumatera dan juga pulau lain yang diusahakan oleh perkebunan negara, swasta maupun rakyat. Sejumlah areal di Indonesia pada umumnya sangat memiliki kesesuaian lahan yang cocok untuk dimanfaatkan dalam pengembangan perkebunan karet yang saat ini kebanyakan hidup di pulau Sumatera dan beberapa ada di pulau Jawa. Di Pulau Sumatera itu sendiri terdapat pada wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Panjaitan, 2017).

Provinsi Riau pada tahun 2017 memiliki total luas lahan sebesar 374.901 hektar dengan urutan posisi pertama di pegang oleh Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai areal yang paling luas dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya yaitu sebesar 85.100 hektar, selanjutnya Kabupaten Kampar yang menempati posisi kedua dengan luas lahan sebesar 74.285 hektar, disusul Kabupaten Rokan Hulu pada urutan ke tiga dengan luas lahan 57.399 hektar, di samping itu

Kabupaten/Kota dengan luas areal perkebunan karet terkecil adalah Kota Pekanbaru dengan luas lahan hanya sebesar 452 hektar.

Tabel 2. Luas Areal Perkebunan Karet Riau Tahun 2017 (Ha)

<b>Kabupaten Kota</b> <i>Rigency/City</i>	<b>Luas Lahan</b> <i>Land Area</i>
Kuantan Singingi	85.100
Kampar	74.285
Indragiri Hulu	43.951
Rokan Hulu	57.399
Bengkalis	22.724
Pelelawan	40.609
Rokan Hilir	23.165
Kepulauan Meranti	9.858
Siak	11.380
Indragiri Hilir	4.286
Pekan Baru	452
Dumai	1.692
<b>Total</b>	<b>374.901</b>

*Sumber : (BPS, 2017)*

Data tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu mempunyai prospek yang baik terhadap peningkatan ekonomi Riau melalui komoditas perkebunan karet dengan potensi luas lahan terbesar ke tiga di Provinsi Riau yaitu dengan luas lahan sebesar 57.399 hektar, maka dengan itu tidak heran bahwa sebagian besar Masyarakat Rokan Hulu pada posisinya masih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani karet.

Kabupaten Rokan Hulu dalam perkembangannya sesuai data BPS Rokan Hulu tahun 2014 menyatakan bahwa luas areal tanaman perkebunan karet di Rokan Hulu yaitu sebesar 48.796 Ha dengan jumlah petani sebanyak 23.775 Orang. Artinya terdapat peningkatan luas lahan dari semula 47.796 Ha di 2014 menjadi 57.399 Ha tahun 2017. Lebih dari itu dengan jumlah petani sebanyak 23.775 hal ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat Rokan Hulu sebagian besar

bermata pencaharian sebagai petani karet yang tentunya dapat mempertegas bahwa Kabupaten Rokan Hulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam prospeknya untuk keberlangsungan komoditas karet. Kondisi alam yang berada di daerah tropis yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa, membuat tanaman karet tumbuh subur dan berkembang di Rokan Hulu. Pada Tabel 3 berikut menunjukkan keadaan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu menurut jumlah petani dan luas areal menurut jenis tanamannya.

Tabel 3. Data Jumlah Petani dan Luas areal Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Rokan Hulu 2014

<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Jumlah Petani</b>	<b>Luas Areal (Ha)</b>
Karet ( <i>Rubber</i> )	23.775	48.796
Kelapa Sawit ( <i>Palm oil</i> )	69.175	158.241
Kelapa ( <i>Coconut</i> )	5.258	1.090
Coklat ( <i>Cocoa</i> )	490	195
Kopi ( <i>Coffe</i> )	414	146
Pinang ( <i>Areca nut</i> )	526	71
Enau ( <i>Palm Sugar</i> )	391	9
Gambir ( <i>Gambier</i> )	58	30

*Sumber: (BPS, 2014)*

Berdasarkan besarnya potensi yang dapat dilihat dari data (BPS, 2014) di atas, maka komoditas karet di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang tersebar di 16 Kecamatan seharusnya lebih dikembangkan dan diusahakan dengan sebaik baiknya sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang harusnya memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang bermula pada kebijakan pemerintah. Sehingga menjadi menarik bahwa hal itu dapat kita lihat pada beberapa wilayah di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan penyebaran dan luas lahan yang sangat besar.

Tahun 2019, kebijakan pemerintah terhadap komoditas karet berorientasi pada usaha pemerintah dalam memperbaiki harga karet alam yaitu dengan kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Jangka pendek ini

berkaitan dengan pengaturan jumlah ekspor karet alam, jangka menengah yaitu peningkatan penggunaan karet dalam negeri dan jangka panjang dengan kebijakan pemerintah terhadap peremajaan (*replanting*) karet alam (ITRC, 2019).

Tabel 4. Luas Area Karet Perkecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Area (Ha)</b>
Rokan IV Koto	7.215
Pendalian IV Koto	3.579
Tandun	536
Kabun	2.453
Ujung Batu	310
Rambah Samo	4.391
Rambah	4.351
Rambah Hilir	10.937
Bangun Purba	2.796
Tambusai	3.233
Tambusai Utara	11.458
Kepenuhan	2.815
Kepenuhan Hulu	1.767
Kunto Darussalam	49
Pagaran Tapah	97
Bonai Darussalam	53
<b>Jumlah</b>	<b>56.030</b>

Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017.

Berdasarkan tabel 4 di atas bahwa Kecamatan Rambah Hilir menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas lahan komoditas karet seluas 10.937 hektar dan menjadi salah satu sentra produksi karet terbesar ke dua di Kabupaten Rokan Hulu. (BPS, 2017)

Maka dari itu dengan adanya penerapan kebijakan pemerintah yang salah satunya berorientasi pada subsidi pupuk, kebijakan tersebut akan dapat membantu petani di Kabupaten Rokan Hulu khususnya petani komoditas karet di Kecamatan Rambah Hilir untuk dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau

untuk dapat menghemat biaya produksi karet dan usaha komoditas karet petani agar dapat berjalan secara berkesinambungan. Berikut tabel yang menggambarkan luas perkebunan komoditas karet Percamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan uraian besarnya potensi terkait dengan permasalahan diatas, maka hal itulah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap peningkatan daya saing Komoditas Karet di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana besarnya potensi daya saing (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) komoditas karet di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
- 2 Bagaimana dampak kebijakan pemerintah pada harga input (pupuk) dan output (harga dasar lateks) terhadap Komoditas karet di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1 Melihat besarnya potensi daya saing (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) komoditas karet di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

2. Mengetahui dampak kebijakan pemerintah pada harga input (pupuk) dan output (harga dasar lateks) terhadap Komoditas karet di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

#### **1.4 Batasan Penelitian**

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah anggota kelompok tani di Desa Rambah Hilir dan Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
2. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data petani yang berkaitan dengan komoditas karet saja.
3. Data di ambil ketika musim kemarau.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi civitas akademika, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pertanian di Fakultas Pertanian, Universitas Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Dapat digunakan sebagai titik untuk melakukan penelitian sejenis dalam bahasan kebijakan pemerintah yang berkaitan terhadap daya saing komoditas karet sebagai referensi atau bahan rujukan serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti, sarana dalam peningkatan kompetensi diri, baik pengetahuan maupun keterampilan dalam menganalisa potensi serta permasalahan yang terjadi pada daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas karet di Rokan Hulu khususnya Kecamatan Rambah Hilir.
4. Bagi pemerintah daerah, hasil analisis dampak kebijakan pemerintah diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan

dan mengimplementasikan instrumen-instrument kebijakan yang lebih efektif dan efisien bagi pengembangan agribisnis karet di Rokan Hulu.

5. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui tantang kebijakan pemerintah terhadap peningkatan daya saing komoditas karet di Kabupaten Rokan Hulu khususnya Kecamatan Rambah Hilir.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

(Sunandar, 2007) dengan judul “Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengusahaan Komoditi Tanaman Karet Alam di Kecamatan Cambai, Kota Prambulih Provinsi Sumatera Selatan” berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini adalah penghitungan ini menggunakan matrik analisis kebijakan (PAM) yang bertujuan untuk melihat daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha tani karet (bokar) Kecamatan Cambai, Kota Prambulih, Provinsi Sumatera Selatan. Usaha tani yang dilakukan petani karet alam di daerah ini memiliki daya saing terlihat dari nilai PCR (Private Cost Ratio) sebesar 0,43 dan keuntungan finansial sebesar Rp.6.903,943/kg. Sedangkan DRC (Domestik Resource Cost Ratio) sebesar 0,77 Persen dan keuntungan sosial (SP) sejumlah 2.791,39/kg. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa komoditi usaha tani karet alam (bokar) terdapat kebijakan pemerintah yang meningkatkan efisiensi dalam berproduksi.

(Arafah, 2016) berjudul “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Komoditas Kakao di Sulawesi Tengah” berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan proteksi biji kakao dalam negeri melalui peraturan bea keluar. Namun, kebijakan tersebut menyebabkan harga kakao dalam negeri masih tergolong rendah dibanding harga kakao di tingkat pasar internasional. Sementara itu, kebijakan pemerintah terhadap input masih bersifat disinsentif terhadap petani. Petani kakao harus membayar input lebih mahal dari seharusnya karena tingkat proteksi pemerintah

terhadap input usahatani kakao lemah. Namun secara bersama-sama, kebijakan input dan output usahatani kakao yang berlaku di Indonesia masih mendukung terhadap produksi kakao dalam negeri. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kakao, meningkatkan harga jual kakao dan menurunkan biaya produksi secara simultan dapat meningkatkan daya saing kakao di lokasi penelitian yaitu Sulawesi Tengah.

(Alghoziyah, 2016) dengan judul “Daya Saing Usaha Tani Karet Rakyat di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Anung Selatan Kabupaten Lampung Utara” Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa usahatani karet rakyat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara menguntungkan bagi petani dan layak untuk diusahakan dengan nilai NPV (Net Present Value) sebesar Rp. 184.672.001,59, Gross B/C sebesar 5,81, Net B/C sebesar 7,05 dan IRR (Internal Rate Of Return) sebesar 48 persen. Usahatani karet Desa Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara berdaya saing dengan nilai PCR sebesar 0,17 dan DRC sebesar 0,09.

(Panjaitan, 2017) penelitian yang berjudul “Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditi Karet di Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Tobasa Samosir” di dalam pembahasan dan hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa Usahatani karet di Kecamatan Pintu Pohan Kabupaten Toba Samosir memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif sedangkan kebijakan pemerintah pada harga input – outputnya berdampak nyata terhadap pendapatan petani karet pada harga privat. Terdapat tambahan surplus produsen oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada

input-output. Pada kebijakan input-output diperoleh nilai Profitability Coefficient (PC) sebesar 6,11 /petani dari 4,60 /ha.

## **2.2 Landasan Teori**

Menurut Monke dan Pearson dalam (Panjaitan, 2017) kebijakan merupakan suatu keputusan atau ketetapan yang diambil oleh pemerintah yang berfungsi untuk melindungi petani dalam negeri. Kebijakan tersebut dapat meliputi pengenaan tarif masuk atau kuota terhadap barang yang akan masuk ke dalam suatu negara dengan harapan akan dapat mengurangi persaingan yang akan terjadi jika produk tersebut juga dihasilkan oleh petani dalam negeri.

## **2.3 Sejarah Kebijakan Perkebunan Karet di Indonesia**

Sejarah kebijakan komoditas karet Indonesia di mulai sejak pemerintah indonesia yang di pimpin oleh presiden soekarno pada kurun waktu tahun 1945-1966, Sebagai Presiden Republik Indonesia pada masa orde lama Presiden Soekarno mengambil kebijakan dengan menasionalisasikan perusahaan perusahaan perkebunan komoditas karet milik Kolonial Belanda yang pada saat itu banyak tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan, jika di Pulau Sumatera maka perusahaan itu terdapat di wilayah Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu serta perusahaan kolonial Belanda yang terdapat di berbagai wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan Selatan. Kebijakan dalam menasionalisaikan aset perusahaan kolonial belanda yang berdiri di indonesia pada saat itu dijadikan sebagai langkah awal yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan yaitu menata perusahaan perusahaan perkebunan karet tersebut agar dapat memberikan hasil yang menjadi lebih baik untuk dapat memberikan dampak positif dalam membantu perekonomian bangsa

Indonesia yang baru merdeka. Dalam menjalankan kebijakan penataan perusahaan perusahaan perkebunan karet ini dimulai tahun 1958 pada masa Orde Lama yang dengan adanya kebijakan itu menghasilkan suatu kebijakan yang dikenal dengan nama PPN Baru atau di sebut dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara Baru. PPN Baru ini di gunakan pemerintah indonesia untuk membiayai upaya perebutan Irian Barat yang saat itu masih dikuasai oleh koloniel Belanda. Maka dari itu di antara langkah penting yang dilakukan pemerintah saat itu yaitu dengan mengganti seluruh manajemen perusahaan dengan orang-orang asli rakyat Indonesia (Pahrudin, 2012).

Seiring dengan perubahan rezim pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, maka pada masa Orde Baru saat dasawarsa tepatnya padatahun 1967-1977 Penataan perkebunan karet lebih dilakukan dengan cara yang lebih menyeluruh atau komprehensif, hal ini berkelanjutan dengan memasukkan perkebunan karet rakyat dalam kebijakan pengaturan pemerintah. Jika di masa Orde Lama perkebunan komoditas karet disamaratakan, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun yang dikelola secara mandiri oleh rakyat, maka di masa pemerintahan Orde Baru sub sektor perkebunan karet rakyat lebih mendapatkan porsi tersendiri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ini mengambil kebijakan pengelolaan perkebunan karet dengan cara membaginya menjadi Perkebunan Besar dengan sistem manajemen Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) dan Perkebunan Rakyat dengan sistem Perkebunan Inti rakyat atau PIR sehingga pemerintah juga menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada politik ekonomi pasar bebas, sementara di sisi lain laju inflasi kian tidak terkendali. Akibatnya, pemerintah merasa perlu menata ulang sistem perkebunan

yang selama ini diterapkan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera teratasi. Upaya perombakan tersebut terealisasi dengan terbentuknya Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP), yaitu suatu lembaga perekonomian yang sah dan didukung penuh oleh pemerintah untuk berusaha mengejar keuntungan ekonomis yang sebesar besarnya. Hingga saat ini tercatat telah ada 29 PTP yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari PTP I di wilayah Propinsi Aceh (NAD) hingga PTP XXIX di Surabaya yang wilayah kerjanya mencakup daerah Jawa Timur dan Kalimantan Timur (Pahrudin, 2012).

Meskipun demikian, ternyata inovasi yang terjadi dalam bidang ini tidak berhenti hanya sampai di situ. Pada tahun 1977 terbentuklah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan penerapan *Nucleus Estate System* (NES) yang berfungsi untuk membina perkebunan rakyat dengan pembiayaan, terutama bersumber dari keuntungan yang diperoleh dari PTP, serta bantuan dari luar negeri. Kebijakan ini pertama kali diterapkan di Tabenan (Sumatera Selatan) dan Langsa (Aceh) pada tahun 1977 yang dibiayai oleh Bank Dunia dan kemudian terus dikembangkan, bahkan antara tahun 1980-1981 telah mencapai 10 lokasi PIR. Sedangkan di Riau, pemerintah Pusat dan Daerah telah melakukan pembangunan dengan menerapkan strategi modernisasi. Secara umum strategi yang diterapkan untuk membangun perkebunan karet-rakyat adalah melalui cara: Pertama, pemerintah membentuk pusat-pusat pengolahan karet di beberapa daerah sentra produksi, dengan sasaran untuk menampung dan mengolah lateks dari hasil perkebunan rakyat. Program ini bertujuan untuk memperbaiki mutu olahan karet-rakyat. Kedua, melakukan pembinaan perkebunan rakyat dengan membentuk unit pelaksana proyek (UPP) yang program ini lebih dikenal dengan istilah proyek SRDP. Sistem ini

diharapkan mampu berfungsi sebagai pembina petani karet secara menyeluruh, meliputi dari masalah penanaman hingga persoalan pemasaran. Kebijakan perkebunan rakyat dengan pola PIR juga dilakukan sebagai upaya menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat petani karet miskin yang sering kalah bersaing dengan perusahaan besar. Pola PIR dilakukan dengan memberdayakan perusahaan besar yang berfungsi sebagai inti untuk membantu petani karet (plasma) sehingga terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Pola ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan petani karet yang selama ini berada pada posisi yang kecil dan juga berfungsi untuk merangsang kenaikan produksi petani karet termasuk di wilayah Provinsi Riau (Pahrudin, 2012).

Pada tahun 2006 setelah berada pada situasinya pemerintah mengambil kebijakan untuk memperlihatkan eksistensi karet rakyat melalui peraturan RI Nomor 33/Permentan/OT 140/7/2006 tentang pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan (Permentan, 2006).

Kebijakan pemerintah ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (Permenkeu, 2006).

Keberlangsungan Peraturan Menteri Pertanian pada Tahun 2006 pada saat itu dilanjutkan dengan peraturan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI No 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijadikan pemerintah sebagai acuan pedoman dalam upaya pemerintah itu sendiri untuk membantu mengembalikan eksistensi para petani karet rakyat. Melalui kebijakan pemerintah terkait dengan program KUR khusus tersebut dapat di gunakan untuk pembiayaan peremajaan tanaman (Kemenko, 2017).

Maka Ada dua kebijakan strategis dalam pembangunan perkebunan secara nasional yaitu kebijakan umum dan kebijakan teknis, kebijakan umum adalah membangun perkebunan yang berorientasi pada pasar melalui peningkatan inisiatif dan partisipasi masyarakat sehingga peran pemerintah hanya menyediakan fasilitas umum, seperti sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi serta regulasi yang berdasarkan kepada mekanisme insentif dan disentif. Sedangkan kebijakan teknis mencakup kebijakan pemberdayaan masyarakat, kebijakan peningkatan daya saing, kebijakan investasi melalui peningkatan regionalisasi dan kebijakan restrukturisasi dan renovasi kelembagaan (Alghoziyah, 2016).

Dalam perkembangannya, tanaman karet tidak berdampak negatif terhadap keadaan lingkungan dan perbaikan konservasi, komoditas karet ini merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat penting, baik sebagai sumber pendapatan/sumber nafkah petani, penghasil devisa negara, kesempatan kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi serta sebagai sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. Dalam perjalanan panjang ekonomi Indonesia, dapat diketahui bahwa jumlah Ekspor karet Indonesia tahun 2014 sebesar 2.623.471 ton dengan nilai sebesar 4.741.574.000 US\$ (Ditjenbun, 2015).

#### **2.4 Konsep Daya Saing**

Dalam konsepnya bahwa peningkatan daya saing produk pertanian itu dapat dilaksanakan dengan situasi pengembangan agribisnis yang melalui konsep industrisasi pertanian. Pengembangan ini diarahkan pada sistem sektor agribisnis sebagai salah satu sistem keseluruhan yang dilandasi dengan prinsip efisiensi

keberlanjutan yang tentunya dilanjutkan melalui kondisi vertikal atas kesulitan dari usaha tani yang mengakibatkan terjadinya produk akhir untuk dapat dijamin serta disesuaikan melalui preferensi konsumen. Daya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu sektor, industri atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam lingkungan global selama biaya imbangnya lebih rendah dari penerimaan sumberdaya yang digunakan (Rahmi, 2014).

Sedangkan dalam pengertiannya, konsep daya saing adalah sesuatu yang sangat dinamis, di mana keunggulan saat ini bisa saja menjadi ketidakunggulan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing tentunya akan berorientasi pada kemampuan suatu daerah dalam perekonomiannya untuk menetapkan faktor faktor yang dapat di gunakan sebagai referensi ukuran daya saing daerah serta kemampuan daerah dalam menetapkan kebijakan terhadap daerah daerah yang lainnya (Alghoziyah, 2016).

## **2.5 Policy Analisis Matrix (PAM)**

Menurut Pearson dalam (Herlina, 2017) mengatakan terdapat tiga tujuan utama dari metode PAM, pertama yaitu memberikan informasi dan analisis untuk membantu dalam pengambilan kebijakan pertanian yang berkaitan dengan sebuah sistem usahatani apakah memiliki daya saing pada teknologi dan tingkat harga yang ada atau tidak, mengetahui dampak investasi publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur terhadap tingkat efisiensi usahatani, dampak investasi baru dalam bentuk riset teknologi pertanian terhadap tingkat efisiensi usahatani. Sebuah tabel PAM untuk suatu usahatani memungkinkan seseorang untuk menghitung tingkat keuntungan privat. Tujuan yang kedua dari analisis PAM

adalah menghitung tingkat keuntungan sosial suatu usahatani dengan cara menilai output dan biaya pada tingkat harga efisiensi (*social opportunity cost*). Tujuan yang ketiga adalah menghitung transfer effects sebagai dampak dari sebuah kebijakan, dengan membandingkan keuntungan dan biaya sebelum dan sesudah penerapan kebijakan.

Tabel berikut ini menyebutkan beberapa komponen yang terdapat pada PAM

Tabel 5. Matrix Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Matrix*)

Uraian	Penerimaan Output	Biaya Input Tradable	Faktor Domestik	Keuntungan
<b>Harga Privat</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Harga Sosial</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>Dampak Kebijakan</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>

Dengan perhitungan menggunakan metode PAM adalah sebagai berikut :

$$\text{Keuntungan Privat (D)} = (A) - (B + C)$$

$$\text{Keuntungan Sosial (H)} = (E) - (F + G)$$

$$\text{Transfer Output (I)} = (A) - (E)$$

$$\text{Transfer Input (J)} = (B) - (F)$$

$$\text{Transfer Faktor (K)} = (C) - (G)$$

$$\text{Transfer Bersih (L)} = (D) - (H)$$

$$\text{Rasio biaya privat (PCR)} = C / (A-B)$$

$$\text{Rasio biaya sumber daya domestik (DRCR)} = G / (E-F)$$

$$\text{Koefisien proteksi output nominal (NPCO)} = A/E$$

$$\text{Koefisien proteksi input nominal (NPCI)} = B/F$$

$$\text{Koefisien proteksi efektif (EPC)} = (A-B) / (E-F)$$

$$\text{Profitability Coefficient, PC} = D/H$$

$$\text{Subsidy Ratio to Producer, SRP} = L/E \text{ atau } (D-H)/E$$

Keterangan :

A	: Penerimaan Privat	G	: Biaya Input non tradable Sosial
B	: Biaya input Tradable	H	: Keuntungan Sosial
C	: Biaya input non tradable	I	: Transfer Output
D	: Keuntungan Privat	J	: Transfer input Tradable
E	: Penerimaan Sosial	K	: Transfer Faktor
F	: Biaya input tradable Sosial	L	: Laba Bersih

Berdasarkan tabel 5 menurut Pearson dalam (Panjaitan, 2017) beberapa indicator hasil analisis dari matriks PAM sebagai berikut :

### 2.5.1 Analisis Keuntungan

#### 1. *Private Profitability* (Keuntungan Privat)

Keuntungan privat  $D = A - (B+C)$  yaitu merupakan suatu indikator daya saing dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijakan. Apabila  $D > 0$ , berarti sistem komoditas memperoleh laba atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditas tersebut mampu ekspansi atau menciptakan pasar baru, kecuali apabila sumberdaya terbatas atau adanya komoditas alternatif yang lebih menguntungkan.

#### 2. *Social profitability* (Keuntungan Sosial)

Keuntungan sosial  $H = E - (F+G)$  yaitu merupakan indikator keuntungan komparatif (*comparative advantage*) dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada divergensi, baik akibat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar. Apabila  $H > 0$ , berarti sistem komoditas memperoleh laba atas biaya normal dalam harga sosial dan mempunyai keunggulan komparatif.

### 2.5.2 Efisiensi Finansial dan Efisiensi Ekonomi

#### 1. *Private Cost Ratio* (Nilai Rasio Biaya Privat)

*Private Cost Ratio* atau  $PCR = C/(A-B)$  merupakan indikator profitabilitas privat yang menunjukkan kemampuan sistem untuk membayar biaya domestik dan tetap kompetitif. Sistem bersifat kompetitif jika  $PCR < 1$ . Semakin kecil nilai PCR berarti semakin kompetitif.

#### 2. *Domestic Resource Cost Ratio* (Rasio Biaya Input Non Tradable)

*Domestic Resource Cost Ratio* atau  $DRCR = G/(E-F)$  merupakan indikator keunggulan komparatif, menunjukkan jumlah sumber daya domestik yang dapat dihemat menghasilkan satu unit devisa. Sistem mempunyai

keunggulan komparatif jika  $DRCR < 1$ . Semakin kecil nilai  $DRCR$  berarti sistem semakin efisien dan mempunyai keunggulan komparatif makin tinggi.

### 2.5.3 Dampak Kebijakan Pemerintah

#### 1. Kebijakan Output

##### a. Transfer Output, $I = A - E$

Transfer Output adalah selisih antara penerimaan yang dihitung atas dasar harga privat (finansial) dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial. Jika  $I > 0$  menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) ke produsen, demikian juga sebaliknya.

##### b. *Nominal Protection Coefficient on Output* : $NPCO = A/E$

*Nominal Protection Coefficient on Output* atau koefisien proteksi output nominal (NPCO) yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap output pertanian domestik.

Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika nilai  $NPCO > 1$ . Semakin besar nilai  $NPCO$  berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap output.

#### 2. Kebijakan Input

##### a. Transfer Input, $J = B - F$

Transfer input yaitu selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan dengan harga privat dengan biaya yang dapat diperdagangkan dengan harga sosial. Jika nilai  $TI > 0$ , menunjukkan adanya transfer dari petani ke produsen input tradable.

##### b. *Nominal Protection Coefficient on Input*, $NPCI = B/F$

*Nominal Protection Coefficient on Input* yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input pertanian

domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai NPCI  $< 1$ , berarti ada kebijakan subsidi input tradable. Sebaliknya jika NPCI  $> 1$  maka pemerintah menaikkan harga input asing di pasar domestik di atas harga efisiensinya (harga dunia). Akibatnya biaya produksi menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

c. Transfer Faktor,  $K = C - G$

Transfer faktor atau *Factor Transfer* (K) merupakan nilai yang menunjukkan perbedaan harga privat dengan harga sosialnya yang diterima produsen untuk pembayaran faktor –faktor produksi yang tidak diperdagangkan. Nilai TF  $> 0$ , berarti ada transfer dari petani produsen kepada produsen input non tradable, demikian sebaliknya.

3. Kebijakan Input – output

a. Effective Protection Coefficient,  $EPC = (A-B)/(E-F)$

*Effective Protection Coefficient* atau koefisien proteksi efektif (EPC) yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input tradable. Kebijakan masih bersifat protektif jika nilai EPC  $> 1$ . Semakin besar nilai EPC berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditas pertanian domestik.

b. *Net Transfer*,  $L = D - H$

*Net transfer* atau ransfer bersih (L) adalah selisih antara keuntungan bersih yang benar benar diterima produsen (privat) dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai NT  $> 0$ , menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input – output , demikian sebaliknya.

c. *Profitability Coefficient*,  $PC = D/H$

*Profitability Coefficient* atau koefisien keuntungan (L) adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang benar – benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Jika  $PC > 1$ , berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan intensif kepada produsen, demikian sebaliknya.

d. *Subsidy Ratio to Producer*,  $SRP = L/E$

*Subsidy Rati to Producer* adalah subsidi rasio bagi produsen (SRP) yang diperoleh dari hasil pembagian antara *net transfer* (L) dengan penerimaan pada harga sosial (E). Jika SRP negatif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan petani karet mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya sosialnya, demikian sebaliknya.

PAM (*Policy Analysis Matrix*) dalam penggunaannya sebagai alat analisis untuk kegiatan perekonomian yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu privat dan sosial (bayangan) dengan perbedaan dari keduanya berakibat pada perbedaan perlakuan terhadap input yang berarti pada pemasukan harga misalnya pupuk, pertisida, peralatan dll dan output dalam suatu kegiatan produksi yang berarti lateks/getah. PAM digunakan untuk mengetahui keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, sehingga usaha tani tersebut dapat dikatakan berdaya saing tinggi (Panjaitan, 2017).

Daya saing ataupun keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tentunya dapat ditingkatkan jika pemerintah mampu melindungi petani dengan menerapkan kebijakan yang sifatnya melindungi petani karet. sebagai contohnya yaitu menerapkan harga minimum karet yang selama ini belum ada keberanian

pemerintah menerapkan kebijakan yang menuju pada arah perlindungan harga karet. Maka akibatnya harga karet pada sampai saat ini stagnan bahkan terus menurun serta terkesan tidak dapat dihindarkan yang tentunya berdampak pada pengaruh besaran pendapatan petani serta berdampak pada produksi karet yang dihasilkan oleh petani terlihat kurang berkualitas.

#### 2.5.4 Keunggulan Komparatif

Pada analisis PAM keunggulan komparatif dapat diukur dengan menggunakan DRC (*Domestic Resource Cost*) atau biaya sumber daya domestik. Keunggulan komparatif merupakan suatu konsep yang diterapkan untuk membandingkan beragam aktivitas produksi dan perdagangan di dalam negeri terhadap perdagangan dunia. Dalam teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo pada (Panjaitan, 2017) menyatakan bahwa suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan para petani jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi.

Pengertian dari keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu wilayah memproduksi satu unit dari beberapa komoditas dengan biaya yang relatif rendah dari biaya imbalan sosialnya dan dari alternatif lainnya. Keunggulan komparatif masih dapat dilakukan sekalipun suatu negara mengalami kerugian memproduksi dua jenis komoditi jika dibandingkan dengan negara lain. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi dan mengeksport komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif, sebaliknya negara tersebut akan mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut yang besar. Keunggulan komparatif berubah karena faktor yang mempengaruhinya antara lain ekonomi dunia,

lingkungan domestik dan teknologi. Semakin rendah nilai PCR, maka komoditas tersebut akan semakin memiliki keunggulan kompetitif (Arafah, 2016).

#### 2.5.5 Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif lebih sesuai untuk menganalisis kelayakan finansial dari suatu aktivitas. Kompetitif diukur dengan PCR (*Private Cost Ratio*) disebut dengan nama nilai provitabilitas rasio dan sosial. Salah satu faktor untuk mencapai nilai keunggulan kompetitif adalah teknologi, karena dengan adanya kemajuan teknologi yang untuk menghasilkan sejumlah output yang sama maka diperlukan kombinasi pemakaian input yang lebih sedikit. Keadaan ini disebabkan karena produktivitas input yang meningkat dengan progres kemajuan teknologi tersebut. Keunggulan kompetitif lebih sesuai untuk menganalisis kelayakan finansial dari suatu aktivitas. Maka keunggulan kompetitif digunakan untuk mengukur daya saing suatu aktivitas pada kondisi perekonomian aktual. Konsep keunggulan kompetitif didasarkan pada keadaan perekonomian yang tidak berada dalam keadaan distorsi, namun hal ini sulit ditemukan dalam dunia nyata yaitu keunggulan kompetitif bersifat kompetisi dan bersifat persaingan (Arafah, 2016).

Pada pengertiannya Keunggulan kompetitif adalah nilai keunggulan yang merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu posisi menguntungkan yang berkaitan dengan perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif muncul bila pelanggan merasa bahwa mereka menerima nilai lebih dari transaksi yang dilakukan dengan sebuah organisasi pesaingnya (Panjaitan, 2017).

### 2.5.6 Kebijakan Pemerintah Terhadap Input dan Output

Kebijakan Pemerintah biasanya diberlakukan untuk input dan output yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara harga input dan harga output yang diminta produsen (harga privat) dengan harga yang sebenarnya terjadi jika dalam kondisi perdagangan bebas (harga sosial).

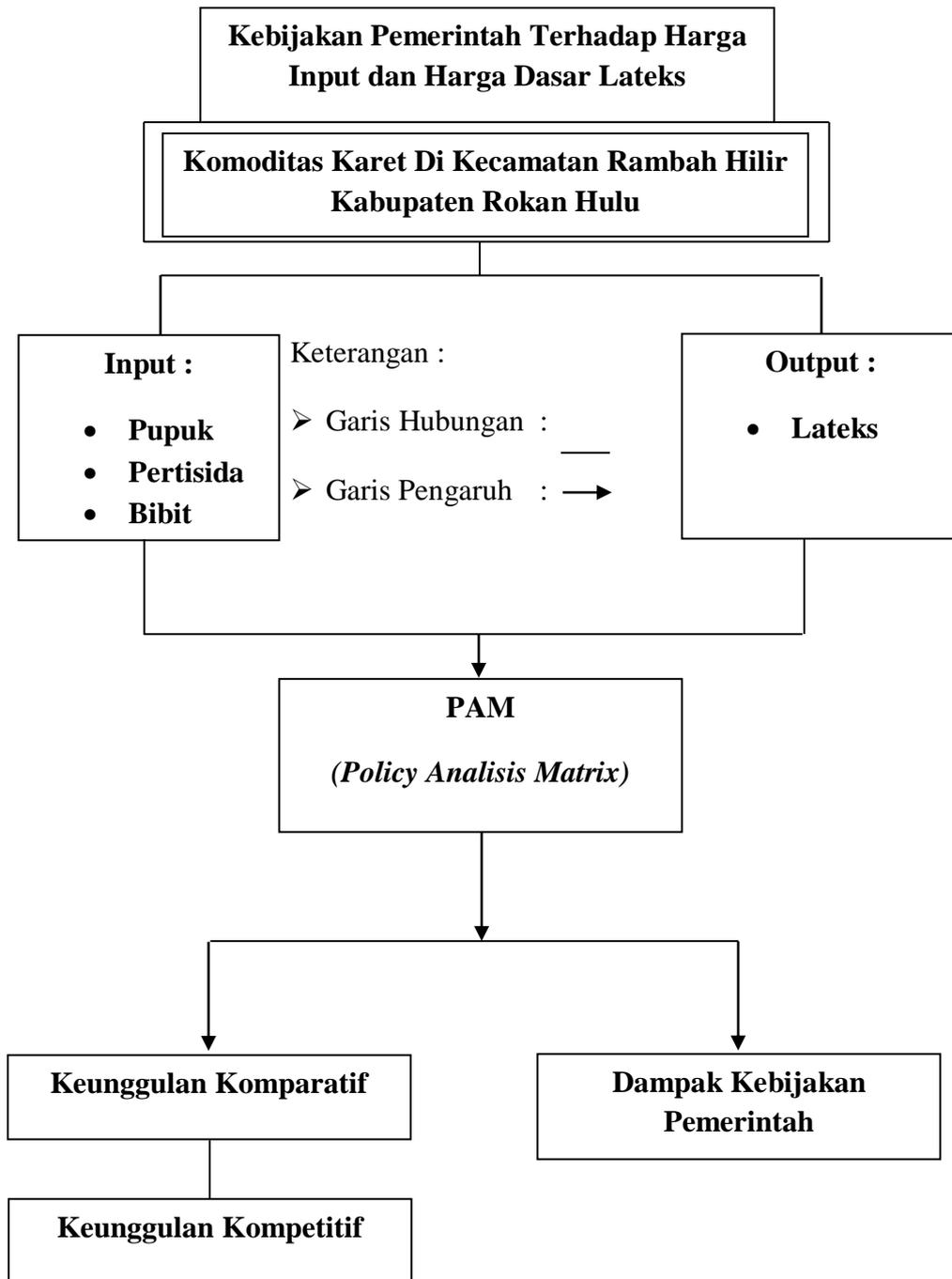
Kebijakan yang ditetapkan pemerintah pada suatu komoditas ada dua bentuk yaitu subsidi dan hambatan perdagangan. Kebijakan subsidi terdiri dari subsidi positif dan subsidi negatif (pajak), sedangkan hambatan perdagangan berupa tarif dan kuota. Efisiensi diperoleh saat alokasi sumber daya yang langka dalam ekonomi menghasilkan sejumlah keuntungan maksimum dan alokasi barang dan jasa memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen (Arafah, 2016).

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Peran penting karet dalam perekonomian Indonesia memunculkan beberapa ide yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh pemerintah terhadap arah kebijakan yang tentunya berpengaruh terhadap perkembangan usaha perkebunan tani komoditas karet. Kebijakan pemerintah terhadap input berkaitan dengan kebijakan harga pupuk, bibit dan obat-obatan seperti pestisida, sebaliknya jika tidak adanya kebijakan input oleh pemerintah maka perlakuan terhadap harga akan mengikuti arus harga internasional (pasar bebas). Jika pada kebijakannya tepat dalam pengembangan usahatani ini, maka akan menimbulkan keunggulan kompetitif dan komparatif yang didasari dengan kebijakan input dan output. Input dalam kebijakannya berkaitan dengan harga pupuk yang dikeluarkan oleh pemerintah sedangkan output adalah hasil dari input tersebut yang berupa lateks/getah. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan harga input lebih rendah

maka akan dapat menurunkan biaya produksi, tapi jika sebaliknya, ketika pemerintah tidak melakukan kebijakan harga input pada tingkat seharusnya, maka akan menimbulkan konsekuensi terkait dengan meningkatnya biaya produksi.

Input dan output akan menjadi daya ukur daya saing dari keunggulan komparatif, sedangkan pada keunggulan kompetitif dapat di ukur pada pendapatan serta penerimaan petani. Jika pendapatan dan penerimaan usahatani karet di barengi dengan kebijakan input dari pemerintah maka usaha tani dalam komoditi karet akan memiliki keunggulan kompetitif. Maka sebaliknya jika Jika pendapatan dan penerimaan usahatani tidak di barengi dengan kebijakan input dari pemerintah maka usaha tani dalam komoditas karet akan memiliki keunggulan kompetitif atau tidak memiliki keunggulan kompetitif. Pada peran keduanya maka letak arah kebijakan tentunya dapat dilihat sebagai pertimbangan bagi pemerintah untuk menerapkan ataupun menetapkan instrumen suatu kebijakan perusahaan komoditas karet. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar I di bawah ini.



**Gambar I. Kerangka Pikir**

*Sumber : Diolah Oleh Peneliti Tahun 2019*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Alasan dalam memilih penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu sentra produksi lateks dengan waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 5 bulan yang di mulai pada bulan Oktober 2019 sampai April 2020.

#### **3.2 Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Multi-Stage Sampling* yaitu dengan pemilihan lokasi sampel diantara pusat kota pemerintahan serta lokasi jauhnya jarak sampel dengan ibu kota pemerintahan yang dilihat dari jalur akses jalan utama menuju pusat pemerinthan kecamatan dan melihat apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap daya saing komoditas karet (Rianse, 2012).

Maka dengan teknik *Multi-Stage Sampling* ini terpilihlah Desa Rambah Hilir sebagai lokasi pengambilan sampel karena terletak di pusat kota pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir dan Desa Serombou Indah sebagai lokasi pengambilan sampel yang jauh dari ibu kota pemerintahan karena sulitnya akses jalan terdekat yang terpotong oleh aliran sungai batang lubuh sehingga akses tanpa hambatan dapat di peroleh melalui jalan Kecamatan Rambah Samo dan Rambah untuk menuju pusat kota pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir (Rianse, 2012).

Sedangkan penentuan sampel yang akan digunakan sebagai responden menggunakan teknik Probabiliti Sampling (*Random Sampling*) dengan semua Kelompok tani yang ada di Desa Rambah Hilir dan Desa Serombou Indah memiliki kesempatan yang sama menjadi responden. Dengan teknik probabiliti sampling maka lebih spesifik bahwa peneliti akan menggunakan teknik Simple Random Sampling yaitu seluruh anggota dari Kelompok tani khusus komoditas karet yang ada di Desa Rambah Hilir dan Desa Serombou Indah dengan total anggota 177 orang dengan rujukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin (Rianse, 2012).

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Maka :

$$n = \frac{177}{(177)(0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{177}{(177)(0,01)^2 + 1}$$

$$n = \frac{177}{1,77 + 1}$$

$$n = \frac{177}{2,77} = 63,8 = 64 \text{ (Sampel)}$$

Maka jumlah sampel yang digunakan yaitu 64 orang dan di bagi pada dua lokasi. (Simluhtan, 2019)

Tabel 6. Data Anggota Kelompok Tani Komoditas Karet di Desa Rambah Hilir Tahun 2019

No	Kelompok Tani	Anggota (L)	Anggota(P)	Jumlah Anggota
1	Karya Bersama	12	4	16
2	Triguna	23	2	25
3	Suka Makmur	3	0	3
4	Taruna Ria Mas	13	0	13
5	Mitra Tani	25	2	27
	<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>8</b>	<b>84</b>

Sumber : Simluhtan, 2019

Tabel 7. Data Anggota Kelompok Tani Komoditas Karet di Desa Serombou Indah Tahun 2019

No	Kelompok Tani	Anggota (L)	Anggota(P)	Jumlah Anggota
1	Tuah Sakti Serombou	4	0	4
2	Okak Subur	20	0	20
3	Subur Jaya	16	2	18
4	Subur Makmur	14	0	14
5	Sei Bongka Makmur	13	2	15
6	Sido Mulia	1	0	1
7	Okak Jaya	12	0	12
8	Harapan Mandiri	9	0	9
	<b>Jumlah</b>	<b>89</b>	<b>4</b>	<b>93</b>

*Sumber : Simluhtan, 2019*

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini di peroleh dari jenis data penelitian kualitatif, yaitu mendalam, jelas dan spesifik. Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

#### 3.3.1 Observasi

(Arikunto, 2013) observasi yaitu memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata sebagai suatu aktiva yang sempit. Secara psikologik, pengamatan (observasi) meliputi kegiatan pemuatan perhatian langsung dengan menggunakan seluruh alat indra terhadap suatu objek, yang berarti penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisisioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tetang sampel petani komoditas karet di Desa Rambah Hilir dan Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

### 3.3.2 wawancara

(Sugiyono, 2013) interview adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dengan artian lain yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden dengan mengharapkan perolehan informasi langsung dari sumber yang ada pada petani komoditas karet di Desa Rambah Hilir dan Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

### 3.3.3 Dokumentasi

(Sugiyono, 2013) dokumendatsi merupakan potret dari peristiwa yang sudah berlalu atau yang sudah dilakukan berupa foto, gambar, serta data data yang berkaitan dengan objek penelitian. Maka hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih sah dapat dipercaya apabila didukung oleh hasil dokumentasi.

### 3.3.4 Studi Pustaka

(Nazir, 2014) Metode pengumpulan data dengan melakukan berbagai penelaahan dari referensi literatur ilmiah, buku, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. Maka dalam hal ini adalah tentang komoditas karet Desa Rambah Hilir dan Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Badan Pusat Statistik, BPS Kabupaten Rokan Hulu, BPS Provinsi Riau, BPP Kecamatan Rambah Hilir serta Kelompok Tani Karet Desa Rambah Hilir dan Desa Serombou Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sebagai pengumpulan data sekunder.

### **3.4 Perbandingan Harga Dengan Aksesibilitas Lokasi**

Dalam (Besanko, 2011) bahwa besarnya pendapatan tergantung pada aksesibilitas dan pengeluaran. Maka dengan lokasi penelitian komoditas karet berada pada dua lokasi yang berbeda yaitu berada pada pusat pemerintahan dan lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan dengan Desa Rambah Hilir dan Desa Serombou Indah sebagai lokasi yang mempunyai berjarak sehingga dapat menimbulkan pertanyaan apakah terdapat perbedaan dan perbandingan harga pendapatan dan penerimaan petani terhadap aksesibilitas jarak lokasi pasar.

### **3.5 Defenisi Operasional**

Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita bagaimana cara untuk mengukur variabel. Defenisi operasional menurut para ahli menjadi salah satu sebagai unsur penelitian yang berbentuk sebagai petunjuk suatu variabel yang di ukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasional dari masing masing konsep yang kemudian di gunakan untuk menggambarkan perilaku maupun gejala yang tentunya dapat di amati dengan kata kata serta dapat di uji dan di ketahui dengan sebenarnya (Sukmaya, 2014).

Maka dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi.

1. Kebijakan pemerintah adalah merupakan suatu keputusan atau ketetapan yang diambil oleh pemerintah yang berfungsi untuk melindungi petani dalam negeri.
2. Input adalah jumlah bayangan pemasukan yang digunakan usahatani karet terdiri dari pupuk, lahan, pestisida, benih, dan peralatan.

3. Harga bayangan input merupakan harga untuk input tradabel (input yang diperdagangkan di pasar internasional) dan input tradabel atau faktor domestik (input yang diproduksi melalui kebijakan pemerintah yang diukur dari harga privat dan harga sosial).
4. Harga input tradable (Pasar internasional) tidak melalui kebijakan pemerintah adalah harga yang di dapatkan dari pasar bebas untuk pemasukan usahatani karet yang diukur dari harga privat dan harga sosial.
5. Input tradable adalah produksi yang dapat diperdagangkan secara internasional.
6. Input non tradable (input domestik) yaitu input yang tidak diperdagangkan sehingga tidak memiliki harga pasar internasional.
7. Harga privat merupakan harga tingkat riil yang diterima petani dalam penjualan hasil produksi atau tingkat harga yang dibayar petani dalam pembelian faktor produksi yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).
8. Harga sosial adalah harga bayangan atau harga internasional dari input produksi karet yang digunakan petani baik input tradabel maupun faktor produksi (Rp).
9. Output yaitu suatu komoditi (barang) yang dihasilkan dari proses produksi yaitu lateks/getah.
10. input dalam kebijakan pemerintah atau input tanpa kebijakan pemerintah memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam usahatani karet mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif.

11. Biaya sosial merupakan bentuk seluruh harga bayangan atau harga internasional dari input produksi karet yang digunakan petani baik input pasar tradable maupun dengan menggunakan kebijakan.
12. Biaya produksi karet merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam usaha komoditas karet dalam satu kali musim tanam, yang merupakan hasil perkalian antara harga input dengan jumlah inpu yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).
13. Penerimaan petani adalah hasil perkalian antara jumlah produksi karet dengan harga jual lateks yang diterima petani.
14. Pendapatan petani yaitu hasil penerimaan dari usahatani karet yang dikurangi dengan total biaya variabel dan biaya tetap tunai.
15. *Privat profitability* (Keuntungan finansial) merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya dalam harga privat.
16. Keuntungan sosial (*social profitability*) merupakan selisih antara penerimaan usahatani dengan total biaya usahatani.
17. Efek divergensi merupakan antara selisih yang melibatkan penerimaan biaya dan keuntungan usahatani yang kemudian diukur dengan harga aktual/privat dengan yang diukur dengan harga sosial.
18. Keunggulan komparatif adalah pengukur daya saing usahatani yang dihitung atas harga bayangan atau harga sosial di suatu negara.
19. Keunggulan kompetitif adalah pengukur daya saing usahatani yang dihitung atas harga pasar dan nilai uang resmi yang berlaku pada saat ini.